

Judul : Kementerian Pekerjaan Umum Bantah Ikut Siapkan Proyek
Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 9

Kementerian Pekerjaan Umum Bantah Ikut Siapkan Proyek

JAKARTA – Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo, memastikan lembaganya tidak pernah mengusulkan besaran anggaran untuk proyek gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. “Kami hanya membantu standar kebutuhan ruang dan ketentuan gedung negara sesuai aturan,” ujar dia ketika dihubungi kemarin. “Setelah itu, kami tidak pernah lagi berdiskusi,” ujarnya. “Dan gedung DPR tidak pernah miring.”

Dalam sejumlah kesempatan, parlemen selalu berdalih bahwa pembahasan rencana kebutuhan dana proyek gedung baru telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nantinya, dengan alokasi anggaran Rp 320 miliar, setiap anggota Dewan akan mendapatkan ruangan seluas 117 meter persegi sesuai dengan ketentuan. Di dalamnya akan ada ruang rapat seluas 20 meter persegi dan ruang istirahat seluas 10 meter persegi.

Menurut Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Adjar Prajudi, lembaganya tidak tahu soal kelanjutan proyek pembangunan gedung DPR. Sepengetahuan dia, sampai saat ini Dewan tak pernah mengajak rapat untuk membahas hal itu.

Adjar mengingatkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum hanya bertugas memberikan bantuan teknis sejak perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan. “Maket, kontraktor, itu semuanya yang bikin Sekretaris Jenderal DPR,” ujarnya. ● **MUSSEN ARI D / NINS**